BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang awalnya sangat terbatas oleh pengaruh kekuasaan yang terlalu membatasi ruang gerak masyarakat Indonesia. Dengan lahirnya reformasi telah mendorong masyarakat Indonesia lebih leluasa dalam mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Reformasi juga telah mendorong adanya perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang tadinya bersifat sentralisasi atau terpusat sekarang berubah. Hubungan itu menjadi desentralisasi atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lebih optimal dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. Undang-undang 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif setra

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, sehingga kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah sehingga tercipta kondisi masyarakat lebih maju dan sejahtera.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2000:1).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat

berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Salah satu pemerintahan daerah yang berusaha menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintah kabupaten Karawang, dimana hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat kota Karawang dapat terwujud. Pemerintah kabupaten Karawang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Karawang melakukan reorganisasi Kelembagaan Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut, maka dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas Daerah dan 11 Lembaga Teknis Daerah (5 Badan, 4 Kantor, Inspektorat dan RSUD).

Selain lembaga-lembaga yang dijelaskan di atas, dibentuk pula kecamatan dan kelurahan, yang terdiri dari : Kecamatan sebanyak 30 kecamatan, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan. Kelurahan sebanyak 12 kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Daerah Kabupaten Karawang.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Struktur kelembagaan Kabupaten Karawang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas Daerah dan 11 Lembaga Teknis Daerah (5 Badan, 4 Kantor, Inspektorat dan RSUD).

Berdasarkan penjelasan tentang pemerintahan yang baik (*good governance*), maka menurut pendapat saya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus diciptakan hubungan yang baik pula antar pemerintahan maupun masyarakat. Salah satunya dengan mewujudkan komunikasi yang efektif, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu komunikasi, karena proses komunikasi dalam suatu pemeritah memiliki peran yang penting. Ilmu komunikasi diakui sebagai ilmu yang memiliki peran penting sejak abad ke-20. Komunikasi kini tak selalu dihubungkan hanya dengan media dan jurnalistik saja, ada banyak pengembangan yang terjadi dalam ilmu komunikasi sendiri. Salah satu bidang kajian komunikasi yang saat ini sedang menjadi trend atau sorotan adalah Humas atau dikenal dengan *Public Relation* yang selanjutnya disebut PR. Munculnya humas atau PR diakui oleh banyak pihak karena adanya tuntutan kebutuhan akan mediator yang mampu menjembatani dua kepentingan.

Humas atau PR juga memiliki fungsi sebagai penarik simpati, cerminan citra perusahaan dan beragam fungsi komunikasi lainnya yang bertujuan menguntungkan organisasi atau perusahaan tersebut serta meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan atau organisasi tersebut. Peran ini kini juga di sadari oleh instansi pemerintah, bahkan instansi pelayanan masyarakat atau *public service*.

Pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang dilakukan dengan komunikasi pembangunan dapat mewujudkan upaya penemuan agar lebih baik dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat yang melahirkan pendekatan, metode, dan alat yang dianggap lebih tepatguna. Bukan hanya sekedar tepat guna tetapi juga lebih memperhatikan masyarakat sebagai manusia (subyek), bukan obyek (target) pembangunan.

Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam pengembangan program pembangunan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, mengembangkan sikap dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Tujuan komunikasi pembangunan adalah mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis memilih Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan salah satu organisasi pemerintah yang memiliki devisi Humas Setda yang sudah melembaga (*state of being*), dimana Humas tersebut berhubungan dengan komunikasi pembangunan dan sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan.

Penempatan praktek kerja lapangan sebagai mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Strata 1 (S1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas mahasiswa dalam rangka mewujudkan individu yang

profesional dan siap bekerja, karena dalam era globalisasi ini, hanya individu yang benar-benar memiliki keterampilan, keahlian dan pendidikan dengan kualitas baik yang mampu bersaing di dalam dunia kerja. Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin global adalah keahlian dan keterampilan. Terkadang teori yang diperoleh pada masa kuliah tidak selalu sama atau dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di dalam dunia kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, seharusnya antara teori dan praktek harus berjalan seimbang.

1.1 Sejarah Kabupaten Karawang

Sekitar Abad XV Masehi, Agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syeikh Hasanudin bin Yusup Idofi dari Champa yang terkenal dengan sebutan Syeikh Quro. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini yang menjadikan dasar pemberian nama Karawang, yang berasal dari Bahasa Sunda yaitu **Ka-rawa-an** yang memiliki arti tempat atau daerah yang berawa-rawa. Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut adalah selain daerah rawa-rawa yang masih tersisa hingga saat ini, banyak juga tempat di daerah Karawang ini yang penamaannya diawali dengan kata “rawa”, seperti Rawasari, Rawagede, Rawamerta, Rawagempol, Rawagabus, Rawasikut, dan lain-lain.

Keberadaan daerah Karawang yang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Daerah Bogor, karena Karawang pada masa itu merupakan jalur

lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Daerah Ciamis. Sumber lain (buku-buku yang dicatat dalam sejarah bangsa Portugis) tahun 1512 dan 1522 menerangkan bahwa "pelabuhan-pelabuhan penting" dari Kerajaan Padjajaran adalah **"CARAVAN"**, yang dimaksud sebagai "*CARAVAN*" dalam sumber tadi adalah tentang letak daerah Karawang yang berada disekitar Sungai Citarum.

Sejak dulu jika akan melewati daerah rawan, demi keamanan di jalan orang-orang selalu bepergian secara berkafilah atau rombongan dengan menggunakan hewan sperti kuda, sapi, kerbau atau keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada jaman dahulu kesatuan-satuan Khalifah yang dalam bahasa portugisnya disebut *"CARAVAN"*. Membuat palabuhan-pelabuhan yang berada disekitar muara Sungai Citarum yang menjorok hingga ke daerah-daerah pedalamannya, sehingga dikenal dengan sebutan *"CARAVAN"* yang kemudian berubah menjadi Karawang.

Luas Wilayah Kabupaten Karawang pada saat itu, tidak sama dengan luas Wilayah Kabupaten Karawang pada masa sekarang. Pada waktu itu luas Wilayah Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang sendiri.

Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, pada tahun 1580 Masehi berdiri Kerajaan Sumedanglarang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Geusan Ulun. Kerajaan Islam Sumedanglarang, pusat pemerintahannya berada di Dayeuhluhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang.

Pada tahun 1608 Prabu Geusan Ulun wafat dan digantikan oleh putranya Ranggagempol Kusumahdinata. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan Rajanya Sultan Agung (1613 - 1645). Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan mengusir Kompeni (Belanda) dari Batavia.

Ranggagempol Kusumahdinata sebagai Raja Sumendanglarang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengakui kekuasaan Mataram. Maka pada Tahun 1620, Ranggagempol Kusumahdinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan kerajaan Sumedanglarang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Ranggagempol Kusumahdinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati (Wadana) untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah disebelah Timur Kali Cipamali, disebelah Barat Kali Cisadane, disebelah Utara Laut Jawa, dan disebelah Selatan Laut Kidul.

Pada Tahun 1624 Ranggagempol Kusumahdinata wafat, dan sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Ranggagede, Putra Prabu Geusan Ulun. Ranggagempol II, putra Ranggagempol Kusumahdinata yang semestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan Kerajaan Sumedanglarang dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedanglarang akan diserahkan kepada Banten.

Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah Pimpinan Sultan Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Ranggagempol II, Tetapi merupakan awal usaha Banten

untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni (Belanda), yaitu pelabuhan Sunda Kelapa.

Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada Tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 Prajurit dengan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia.

Langkah awal yang dilakukan Aria Surengrono adalah dengan mendirikan 3 (tiga) Desa yaitu Waringinpitu (Telukjambe), Desa Parakansapi (di Kecamatan Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur) dan Desa Adiarsa (Sekarang ternlasuk di Kecamatan Karawang Barat), dengan pusat kekuatan di ditempatkan di Desa Waringinpitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dengan Mataram, Aria Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan kepada Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal dilaksanakan.

Demi menjaga keselamatan Wilayah Kerajaan Mataram sebelah barat, pada tahun 1628 dan 1629, bala tentara Kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia. Namun serangan ini gagal disebabkan keadaan medan yang sangat berat. Sultan Agung kemudian menetapkan Daerah Karawang sebagai pusat logistik yang harus

mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada dibawah pengawasan Mataram serta harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun pesawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC (belanda) di Batavia.

Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa Sari Galuh dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang dianggap gagal.

Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya langsung dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas keberhasilannya Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugrahi jabatan Wedana (Setingkat Bupati) di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama "Karosinjang". Setelah penganugrahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir Illahi Beliau kemudian wafat saat berada di Galuh. Setelah Wiraperbangsa Wafat, Jabatan Bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677.

Pada abad XVII kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram, dengan raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. la tidak menginginkan wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin mempersatukan Nusantara. Dalam upaya mengusir VOC yang telah menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu menguasai daerah Karawang, untuk dijadikan sebagai basis atau pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. Ranggagede diperintahnya untuk mempersiapkan bala tentara/prajurit dan logistik dengan membuka lahan-Iahan pertanian, yang kemudian berkembang menjadi lumbung padi.

Tanggal 14 September 1633 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Maulud 1043 Hijriah, Sultan Agung melantik Singaperbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama, sehingga secara tradisi setiap tanggal 10 Maulud diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang. Berawal dari sejarah tersebut dan perjuangan persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Karawang lebih dikenal dengan julukan sebagai kota pangkal perjuangan dan daerah lumbung padi Jawa Barat.

Berikut ini adalah silsilah para Bupati Karawang yang berkedudukan di Karawang dari masa lampau sampai dengan sekarang, antara lain yaitu **Raden Adipati Singaperbangsa (1633 - 1677)** yang dikenal dengan sebutan Kyai Panembahan Singaperbangsa atau Dalem Kalidon disebut juga Eyang Manggung. Beliau merupaan putera Wiraperbangsa dari Galuh (Wilayah Kerajaan Sumedanglarang), bergelar Adipati Kertabumi IV. Pada saat itu pemerintahan Kabupaten Karawang berada di Bunut Kertayasa yang sekarang termasuk wilayah

kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat. Dalam melaksanakan tugasnya beliau didampingi oleh Aria Wirasaba, yang pada saat itu oleh kompeni disebut sebagai *"Het Tweede Regent*" sedangkan Raden Adipati Singaperbangsa sebagai *"Hoofd Regent"*. Raden Adipati Singaperbangsa wafat pada tahun 1677. Dimakamkan di Manggung Ciparage Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon.

Raden Anom Wirasuta (1677 - 1721), bergelar Adipati Pantayudha I. Beliau dilantik menjadi Bupati karawang di Citarum – Pangkalan. Setelah wafat beliau dimakamkan di Bojongmanggu – Pangkalan, karena beliau dimakamkan di tempat tersebut maka beliau dikenal dengan sebutan Panembahan Manggu.

Raden Jayanegara (1721 - 1731), adalah Putera Raden Anom Wirasuta bergelar Adipati Panatayudha II. Setelah wafat beliau dimakamkan di Waru Tengah – Pangkalan, maka beliau dikenal dengan sebutan Penembahan Waru Tengah.

Raden Singanagara (1731 - 1752), dikenal juga dengan nama Raden Martanagara. Bergelar Aria Panatayudha III. Setelah wafat beliau dimakamkan di Waru Hilir Pangkalan, maka beliau dikenal dengan Panembahan Waru Hilir. Pada tanggal 28 November 1994, makam Raden Anom Wirasuta (Bupati Karawang ke-2), makam Raden Jayanegara (Bupati Karawang ke-3) dan makam Raden Singanagara (Bupati Karawang ke-4) dipendahkan ke areal dekat makam Raden Adipati Singaperbangsa di Manggung Ciparage Desa Manggungjaya kecamatan Cilamaya Kulon.

Raden Muhamad Saleh (1752 - 1786), dikenal juga dengan sebutan Raden Muhammad Zaenal Abidin atau Dalem Kulon. Beliau adalah putera Raden Singanagara bergelar Raden Adipati Panatayudha IV. Setelah wafat beliau dimakamkan di Serambi Masjid Agung Karawang, maka beliau dikenal dikenal dengan sebutan Dalem Serambi. Pada tanggal 5 januari 1994, makam beliau dipindahkan ke areal dekat makam Raden Adipati Singaperbangsa di Manggung Ciparage Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon.

Raden Singasari (1786 - 1809), adalah Putera Raden Muhamad Saleh, bergelar Raden Adipati Aria Singasari atau Panatayudha V. Pada tahun 1809 beliau dialihtugaskan menjadi Bupati Brebes Jawa Tengah. Beliau waffat pada tahun 1836, dan dimakamkan di Duro Kebun Agung Jati Barang – Brebes Jawa Tengah, maka beliau dikenal dengan sebutan Dalem Duro.

Raden Aria Sastradipura (1809 - 1811), adalah Putera Raden Muhamad Saleh. Beliau ditugaskan sebagai Cutak (Demang) setingkat Patih dengan tugas pekerjaan Bupati.

Raden Adipati Suryalaga (1811 - 1813), ketika kecil bernama Raden Ema. Beliau adalah Putera Sulung Raden Adipati Suryalaga Bupati Sumedang (1765 - 1783). Raden Adipati Suryalaga adalah saudara misan dan menantu Pangeran Kornel, yaitu suami dari puteri Pangeran Kornel yang bernama Nyi Raden Ageng. Raden Adipati Suryalaga wafat di Talun Sumedang, maka beliau dikenal dengan sebutan Dalem Talun.

Raden Aria Sastradipura (1813 - 1820), adalah Putera Raden Muhamad Saleh (Bupati Karawang ke-5). Beliau untuk kedua kalinya ditugaskan sebagai

Cutak di Karawang, setelah yang pertama yaitu pada periode 1809 – 1811. Pada tahun 1813 Kabupaten Karawang dihapuskan, tetapi pada tahun 1821 dibentuk kembali dengan pusat pemerintahan yang bekedudukan di Wanayasa, Purwakarta.

R. M. Hasan Surya Saca Kusumah (1949 - 1950), merupakan Bupati Karawang yang diangkat oleh Republik Indonesia Serikat (RIS) sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten Karawang di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Maka pada saat itu Kabupaten Karawang terpisah dari Kabupaten Purwakarta. Ibukota Kabupaten Karawang adalah di Karawang, sedangkan Ibukota Kabupaten Purwakarta tetap di Subang. Dalam sumber lain dikatakan bahwa menurut keputusan Wali Negara Pasundan Nomor 12 Tanggal 29 Januari 1949, Kabupaten Karawang dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Karawang Barat dan Kabupaten Karawang Timur (Kabupaten Purwakarta) di Subang.

Raden Rubaya (1950 - 1951), berasal dari Sumedang yang menjadi Wedana Leles di Garut. Beliau memegang jabatan sebagai Bupati Karawang pada periode tersebut.

Moh. Tohir Mangkudijoyo (1951 - 1960), adalah Putera Jaka asal Plered Purwakarta. Pada saat itu beliau didampingi oleh Kepala Daerah Moh. Ali Muchtar Putera Cakrawiguna (Komis Plered) asal Jatisari. Pada tahun 1950 – 1959 Kabupaten mengalami 3 (tiga) macam penggantian pemerintahan daerah. **Pertama,** Pemerintahan Daerah Sementara yang berlangsung dari tanggal 30 Desember 1950 sampai dengan 22 September 1956 yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sebagai unsur legislatif yang diketuai oleh

M. Sukarma Wijaya, dan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPRS) sebagai unsur eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo dengan Wakil Ketua Suhud Hidayat. **Kedua,** Pemerintahan Daerah Peralihan yang berlangsung dari tanggal 22 September sampai dengan 23 Januari 1958, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paralihan (DPRDP) sebagai unsur legislatif diketuai oleh A. Samosir Gultom, dan Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah Peralihan (DPRDP) sebagai unsur eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo. **Ketiga,** Pemerintahan Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 yang berlangsung dari tanggal 25 Januari sampai dengan 20 Oktober 1959, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRDP) sebagai unsur legislatif diketua oleh A. Samosir Gultom, dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai unsur eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo.

Letkol INF. H. Husni Hamid (1960 -1971), merupakan Putera ketiga dari Haji Abdul Hamid asal Cilegon Banten. Sebelum menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Jabatan beliau adalah Dandim 0604 Karawang. Berdasarkan Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960, Jabatan Bupati merangkap sebagai Kepala Daerah dan Ketua DPRD-GR namun peraturan tersebut dirubah lagi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa Jabatan Bupati tidak merangkap sebagai Ketua DPRD-GR. Pada periode 1964 – 1968 beliau didampingi oleh ketua DPRD-GR Damhuri Sodiq, putera RH. Sodiq, penghulu Karawang asal Bogor. Pada periode selanjutnya, yaitu pada tahun 1969 – 1971 beliau didampingi Ketua DPRD-GR Kosim Suchari, putera Haji Ahmad Sa’id. Beliau wafat tahun 1980 dan

dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra – Bandung. Pada masa pemerintahan ini telah mulai dilaksanakan pembamgunan Kota Karawang sebelah utara.

Kolonel INF. Setia Syamsi (1971 - 1976), adalah Putera E. Suparman asal Bandung yang dilahirkan pada tanggal 3 April 1926. Jabatan beliau sebelum menjadi Bupati Karawang adalah Dandim 0604/1 Karawang (1964 - 1969). Kepala Staf Brig 12/Guntur Dam V/ Siliwangi di Cianjur (1969 - 1971).

Kolonel INF. Tata Suwanta Hadisaputra (1976 - 1981), adalah Putera Taslim Kartajumena asal Cirebon yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 April 1924. Jabatan beliau sebelum menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang adalah Dandim Garut, kemudian dialihtugaskan ke Korem Tarumanegara di Garut, anggota DPRD Tingkat I Jawa Barat di Bandung. Beliau ketika menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel INF. R. H. Jaja Abdullah sampai dengan tanggal 7 juli 1977. Ketua DPRD selanjutnya yang mendampingi beliau mulai tanggal 26 Agustus 1977 adalah Letnan Kolonel INF. H. Surjana Priyatna.

Kolonel CPL. H. Opon Sopandji (1981 - 1986), adalah Putera Atma Miharja asal sukapura Tasikmalaya. Sebelum menjabat sebagai Bupati Daerah Tingkat II Karawang, beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Semasa menjabat sebagai Bupati Daerah Tingkat II Karawang, beliau didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel INF. H. Sujana Priayatna.

Kolonel CZI. H. Sumarno Suradi (1986 -1996), adalah Putera Suradi asal Bandung. Sebelum menjabat sebagai Bupati Daerah Tingkat II Karawang, beliau

menjabat sebagai Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil (KAMAWIL) VIII Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat. Selama menjabat beliau didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel INF. H. Sujana Priyatna sampai dengan tanggal 16 Juli 1992. Ketua DPRD yang mendampingi beliau selanjutnya adalah Kolonel INF. H. Jamal Safiudin yang lahir di Bandung pada tanggal 16 Juli 1938.

Kolonel INF. Drs. H.Dadang S. Muchtar (1996 - 2000), adalah Putera RE. Herman asal Cirebon lahir di Klangenan Cirebon pada tanggal 4 September 1952. Sebelum menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang, beliau menjabat sebagai Assisten Logistik Kodam III Siliwangi (1996). Dalam mengemban tugasnya beliau didampingi oleh Ketua DPRD Kolonel. INF. Jamal Safiudin sampai tanggal 3 Agustus 1999, kemudian beliau didampingi oleh Adjar Sujud Purwanto, Putera A. S. Wagianto seorang pejuang 45 dari Cikampek. Tanggal 21 Februari 2000 Kolonel INF. Drs. H. Dadang S. Muchtar resmi berhenti dan kembali ke Mabes TNI.

PLT. R. H. Daud Priatna SH, M. Si (2000), adalah Putera R. Khoesoe Abdoelkohar asal Pedes Karawang lahir pada tanggal 29 Juli 1941. Berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.055 tanggal 21 Februari 2000 ditunjuk disamping tugas Jabatan Wakil Bupati merangkap sebagai Pejabat Bupati Karawang. Jabatan beliau sebelumnya sebagai Sekwilda Tingkat II Subang dan dalam mengemban tugasnya beliau didampingi oleh Ketua DPRD Adjar Sujud Purwanto.

Letkol (PURN) Achmad Dadang (2000 - 2005), adalah Putera Tjasban lahir pada tanggal 8 Agustus 1948 di Desa Cilamaya Karawang. Dilantik sebagai

Bupati Karawang pada tanggal 15 Desember 2000, oleh Gubernur R. Nuriana berdasarkan SK. Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 312.32.583, bersama dengan Drs. H. D. Shalahudin Muftie sebagai Wakil Bupati. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Dandim Aceh Timur Langsa dan Ketua DPRD Tingkat II Aceh Timur Langsa. Dalam mengemban tugasnya beliau didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Adjar Sujud Purwanto, dilanjutkan oleh Slamet Djayusman, yang selanjutnya oleh H. Endi Warhendi. Letkol (PURN) Achmad Dadang wafat pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2007, dimakamkan di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan.

PLT. Drs. H. D. Shalahudin Muftie, M. Si (09-2005 S/D 12-2005), adalah Putera H. Jamil Bin Yusuf lahir di Karawang pada tanggal 3 Nopember 1945. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1017 tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005 melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati Karawang sampai dengan 15 Desember 2005.

Drs. H. Dadang S. Muchtar (2005 - 2010), adalah Putera RE. Herman asal Cirebon lahir pada tanggal 4 September 1952 di Klangenan Cirebon. Kembali memimpin Kabupaten Karawang hasil pilihan rakyat langsung pada PILKADA tahun 2005. Dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2005 oleh Gubernur Jawa Barat Drs. Danny Setiawan berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1035 tahun 2005. Bersama Hj. Eli Amalia Priyatna, Puteri Kolonel Purnawirawan H. Sudjana Priyatna lahir di Garut pada tanggal 8 Nopember 1950. Beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang berdasarkan Kepmendagri

Nomor 131.32.1036 tahun 2005. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh H. Endi Warhendi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang 2004 -2009.

1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karawang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum bahwa salah satu pendekatan dalam rangkaian perencanaan adalah pendekatan politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan visi, misi dan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah.

A. Visi Pemerintah Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tanggal 2 Oktober 2005. Visi, misi dan agenda prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih yang ditawarkan pada saat kampanye selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2006 – 2010, yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2010. Visi Kepala Daerah terpilih, yang merupakan visi yang disampaikan pada masa kampanye pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 yang dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Daerah

secara langsung pada tanggal 2 Oktober 2005, serta pelantikan Kepala Daerah terpilih pada tanggal 16 Desember 2005. Konsekuensi dari upaya pengembangan pembangunan di Kabupaten Karawang adalah adanya suatu pola pemikiran yang dapat dijadikan tolok ukur untuk memahami hakekat pembangunan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Kepala Daerah terpilih menyusun suatu Visi yang dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARAWANG YANG SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG SELARAS DAN SEIMBANG BERDASARKAN IMAN DAN TAKWA".

B. Misi Pemerintah Kabupaten Karawang

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 9 (sembilan) misi yang memuat tujuan sasaran strategi pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian dengan pola agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh sektor industri lainnya
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah
5. Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peluang kerja

6. Meningkatkan pelayanan, pembinaan kehidupan beragama, kesadaran hukum dan hak asasi manusia
7. Menciptakan tata pemerintahan Kabupaten Karawang yang bersih dan berwibawa
8. Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada seluruh kegiatan pembangunan
9. Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

PENJELASAN VISI

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu dipahami arti dari visi dari kepala daerah terpilih. Penjelasan visi menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas, yang terkait erat dengan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Penjabaran inti-inti visi, adalah sebagai berikut :

a. Sejahtera; secara harfiah yaitu (1) aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dsb); (2) selamat tak kurang suatu apa.

Sejahtera yang dimaksud dalam visi yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meliputi hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum; hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman; hak masyarakat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) yang terjangkau; hak masyarakat

untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; hak masyarakat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; hak masyarakat untuk memperoleh keadilan; hak masyarakat berpartisipasi dalam politik; dan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanny.

b. **Selaras dan seimbang** secara harfiah yaitu (1) sesuai; (2) sepadan; (3) sama keadaannya; (4) setimbang; (5) sebanding.

   Selaras dan seimbang yang dimaksud dalam visi tersebut adalah kondisi pembangunan di bidang pertanian, industri dan infrastruktur wilayah, yang saling menunjang secara selaras dan seimbang dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. **Iman dan Takwa** secara harfiah yaitu (1) kepercayaan (yang berkenaan dengan agama); (2) yakin, percaya kepada Tuhan; (3) keteguhan batin; (4) keseimbangan batin.

   Iman dan takwa yang dimaksud dalam visi tersebut adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal.

1.1.2 Logo dan Arti Lambang Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 8 Tahun 1994, maka Kabupaten Karawang menetapkan Logo / Lambang Kabupaten Karawang yang secara arti sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karawang, berikut ini adalah Logo / Lambang dari Kabupaten Karawang :

Gambar 1.1

Logo / Lambang Kabupaten Karawang



Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Karawang

(Website : www.karawangkab.go.id)

Arti Lambang

a. **"Warna Dasar Hijau, Padi dan Kapas"** : Melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan yang senantiasa di wujudkan di Kabupaten Karawang.

b. **"Pintu Air"** - Melambangkan Karawang sebagai daerah pertanian dengan diairi pengairan teknis**.**

c. **"Butir Padi 17, Pintu 8, Tanaman Padi atau Rawa 45"** : Melukiskan semangat juang dalam menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia.
d. **"Golok Lubuk"** : Melambangkan semangat Kabupaten Karawang pantang menyerah dalam membela Tanah Air dan Bangsa**.**
e. **"Bunga Kapas 10"** : Melambangkan tanggal 10 Maulud Tahun Alif 1.555 (Th. Jawa) atau 10 Rabiul Awal 1043 H sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang.
f. **"Alur Putih Empat"** : Melukiskan bahwa Abad ke IV Kerajaan Terumanegara telah menempatkan Sungai Citarum sebagai jalur Perhubungan.

1.2 Sejarah Divisi (Bagian) Humas Pemerintah Kabupaten Karawang

Selama pemerintahan Bupati Karawang pada tahun 2006 – 2010 terdapat 2 kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yaitu berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang dijadikan pedoman penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Sementara berdasarkan Pelaksanaan Tupoksi berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, serta uraian tugas unit kerja berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

Kedudukan Humas adalah eselon III dalam Instansi, dalam Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2008 Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan,yaitu:

a. Pengelolaan data dan informasi
b. Dokumentasi
c. Pemberitaan.

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Pelaksanaan pengolahan data dan sistim informasi
3. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan dokumentasi
4. Pengelolaan kegiatan pemberitaan.

Kepala Sub. Bagian Data dan Sistim Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam pengelolaan kegiatan bidang data dan informasi. Pelaksanaan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Data dan Sistim Informasi, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang data dan sistim informasi
b. Pengumpulan dan pengolahan data
c. Pengelolaan sistim informasi.

Kepala Sub. Bagian Dokumentasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dalam pengelolaan kegiatan bidang dokumentasi. Pelaksanaan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Dokumentasi, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dokumentasi
b. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi
c. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam urusan dokumentasi.

Adapun sebelumnya susunan organisasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Karawang, Kepala Bagian Humas membawahkan :

A. Kasubag Data dan Sistem Informasi
B. Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan
C. Kasubag Pemberitaan

Uraian Tugas masing-masing jabatan diatas pada pelaksanannya :

A. Kepala Bagian Humas

1) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat.
2) Menetapkan Kebijakan Teknis Operasional Bagian sesuai dengan kebijakan umum daerah.
3) Menetapkan rencana dan program kerja Bagian sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4) Mengkoordinasikan pengelolaan kegiaan di bidang hubungan masyarakat yang meliputi : pengelolaan data dan sistem informasi, dokumentasi dan perpustakaan serta pengelolaan pemberitaan.
5) Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai sistuasi perkembangan hubungan masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah..
6) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat untuk bahan perbaikan kedepan, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian sebagai bahan informasi dan pertangggungjawaban kepada pimpinan.
9) Melaksanakan ugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kasubag Data dan Sistem Informasi

1) Menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, standarisasi, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Data dan Sistim Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang data dan sistem informasi.

3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengumpulan dan pengolahan data elektronik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
4) Menyiapkan bahwan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data elektronik serta pengolahan data kegiatan pemerintah daerah.
5) Melakukan penerimaan verifikasi data masukan.
6) Melakukan perekaman dan pengentrian data kedalam peragkat komputer.
7) Melakukan penyusunan standarisasi dan pedoman untuk penyiapan dukungan teknis guna kelancaran Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dilingkungan Pemerintah Daerah.
8) Melakukan pengelolaan data keluaran hasil olahan komputer.
9) Melakukakan penyajian dan pendistribusian data dan informasi.
10) Melakukan penyiapan dan perawatan data dalam media penyimpanan.
11) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil di bidang komputerisasi.
12) Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan urusan Data dan Sistem Informasi.
13) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan data dan sistem informasi.
15) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan

1) Menyiapkan peratuan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Mengumpulkan dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan perpustakaan.
3) Membuat / mendokumentasikan kliping berita koran.
4) Mendokumentasikan kegiatan Pemda, Dinas dan Instansi di Kabupaten Karawang.
5) Mempublikasikan dokumentasi kegiatan hasil pembangunan Kabupaten Karawang baik melalui media cetak maupun elektronik.
6) Mengelola dan meningkatkan fungsi perpustakaan.
7) Mengagendakan data dokumentasi untuk perpustakaan.
8) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan photo kegiatan pembangunan di daerah.
9) Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan urusan Sub Bagian dokumentasi dan perpustakaan.

10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan dokumentasi dan perpustakaan.
12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

D. Kasubag Pemberitaan

1) Menyiapakan peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemberitaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Mengumpulkan dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pemberitaan.
3) Membuat sambutan.
4) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemeberitaan.
5) Mengumpulkan dan menyaring serta menganalisis informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan pers.
6) Menyiapkan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media elektronik dan media cetak (Press Release).
7) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi kegiatan pembangunan di daerah.
8) Menyiapkan bahan dan menerbitkan bulletin pemerintah daerah.

9) Menyiapkan bahwan penyusunan rencana pembuatan brosur, booklet dan papan pengumuman informasi.
10) Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers atau konferensi pers pimpinan pemerintah daerah.
11) Menyiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan pemerintah daerah dengan mengundang pers.
12) Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan urusan sub Bagian Pemberitaan.
13) Melaksanakan koordinas dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pemberitaan.
15) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

1.2.1 Visi dan Misi Hubungan Masyarakat (Humas) Kabupaten Karawang :

Berdasarkan sejarah yang telah dijelaskan di atas maka Humas Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

A. Visi Humas Kabupaten Karawang

”Mewujudkan kelembagaan Humas sebagai organisasi yang profesional dalm membentuk citra dan reputasi positif lembaga pemerintah.

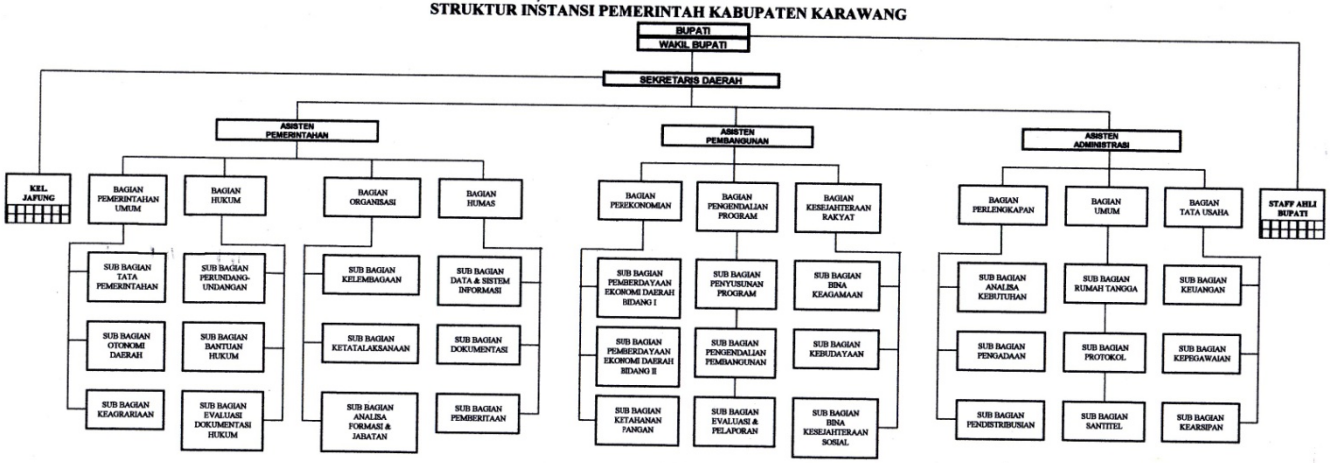
B. Misi Humas Kabupaten Karawang

a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
b. Memberikan pelayanan serta menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijakan dan program kerja kepada masyarakat.
c. Membangun Sumber Daya Humas pemerintah sebagai komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan masyarakat.
d. Menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis dalam mengamankan kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
e. Stabilitas dan keamanan politik pembangunan daerah.

1.3 Struktur Perusahaan / Instansi Pemerintah Kabupaten Karawang

Dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja melalui proses pembahasan secara komprehensif yang melibatkan unsur Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibawah ini adalah struktur Instansi Kabupaten Karawang yang dibuat sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Karawang :

GAMBAR 1.2
STRUKTUR INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG



Sumber : Gambar SOTK Sekretariat Daerah, 2010

33

1.3.1 Penjelasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Karawang.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam susunan organisasi agar mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi Sekretariat Daerah beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi mekanisme kondisi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang membentuk Struktur Organisasi, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari :

A. Asisten Pemerintahan, membawahkan :

1. Bagian Organisasi, membawahkan :
    a. Sub Bagian Kelembagaan
    b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
    c. Sub Bagian Analisa Formasi dan Jabatan.
2. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
    a. Sub Bagian Tata Pemerintahan
    b. Sub Bagian Otonomi Daerah
    c. Sub Bagian Keagrariaan.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :

a. Sub Bagian Data dan Sistem Informasi

b. Sub Bagian Dokumentasi

c. Sub Bagian Pemberitaan.

4. Bagian Hukum, membawahkan :

a. Sub Bagian Perundang-undangan

b. Sub Bagian Bantuan Hukum

c. Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi Hukum.

B. Asisten Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Pengendalian Program, membawahkan :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah Bidang I

b. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah Bidang II

c. Sub Bagian Ketahanan Pangan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a. Sub Bagian Bina Keagamaan

b. Sub Bagian Kebudayaan

c. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial.

C. Asisten Administrasi, membawahkan :

1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

   a. Sub Bagian Keuangan

   b. Sub Bagian Kepegawaian

   c. Sub Bagian Kearsipan.

2. Bagian Perlengkapan, membawahkan :

   a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan

   b. Sub Bagian Pengadaan

   c. Sub Bagian Pendistribusian.

3. Bagian Umum, membawahkan :

   a. Sub Bagian Rumah Tangga

   b. Sub Bagian Protokol

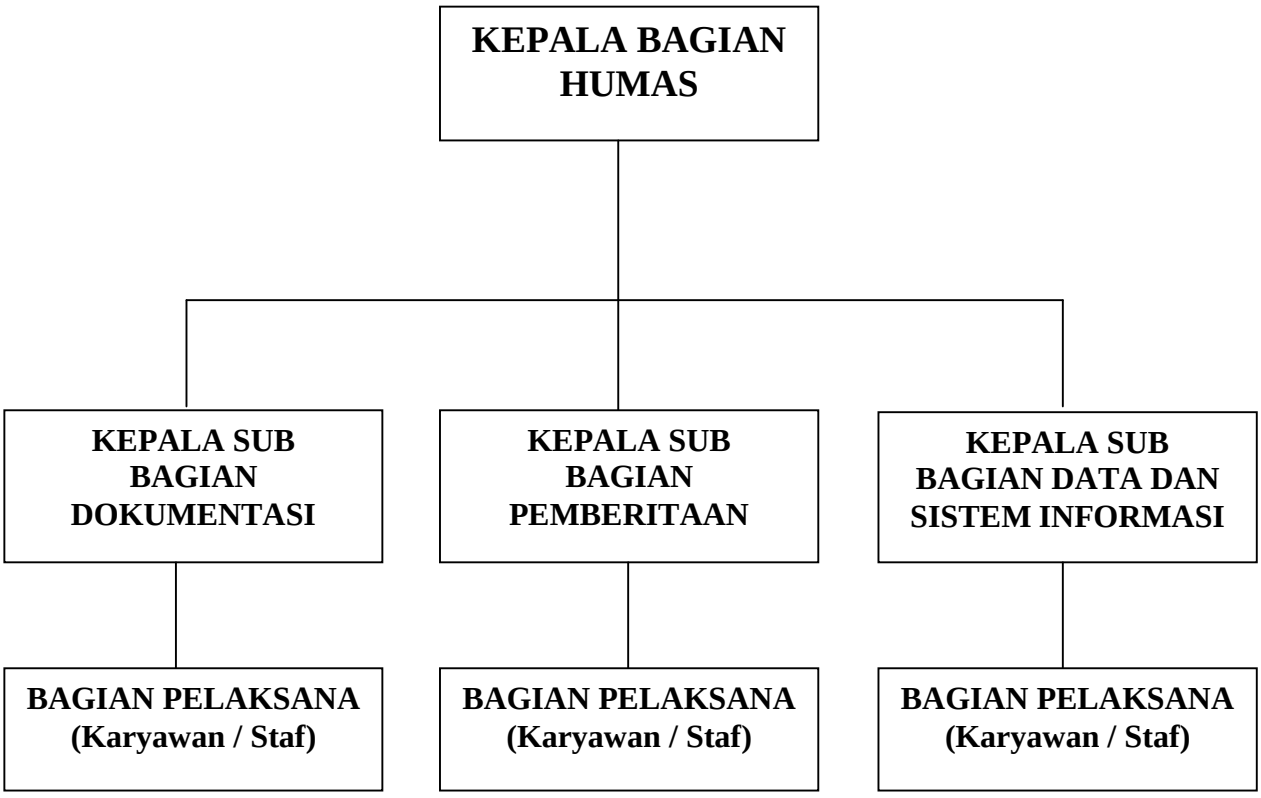
   c. Sub Bagian Sanditel.

1.4 Struktur Divisi Humas Pemerintah Kabupaten Karawang

Struktur organisasi bagian Humas Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar 1. 3 di bawah ini :

Gambar 1. 3

Struktur Divisi Humas Pemerintah Kabupaten Karawang



Sumber : Arsip Profil Lembaga Humas, 2008

Susunan Organisasi pada bagian Humas Setda Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Nama-nama Karyawan Pada Bagian Humas Setda Kabupaten Karawang

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KET
1	Ir. Teny Juliantini, MM NIP: 19630704 198903 2 005	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Humas	
2	Dra. Yuti Surtini, MM NIP: 19610412 199601 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Dokumentasi	
3	Drs. Ii Wahyudin NIP: 19620630 199201 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Pemberitaan	
4	Ade Kurnia, S. Kom NIP: 19680206 199003 1 004	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi	
5	Siti Nurbaeti NIP: 19631112 198803 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	
6	Kurnia Setiawan, ST NIP: 19810822 200501 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	
7	Oktaf Hariaji, ST NIP: 19791031 200501 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	
8	Iwan Gunawan NIP: 19640318 199101 1 006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
9	Irwan Setiawan NIP: 19640818 199202 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
10	Mohamad jaelani, S. Ag NIP: 19730707 200901 1 002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
11	Lilis Ratna, S. Sos NIP: 19820624 200902 2 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
12	Suminta NIP: 19570811 197706 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
13	Asep Yayat Ruchyat NIP: 19790731 199803 1 003	Pengatur (II/c)	Pelaksana	
14	Puspita Rahayu, A. md NIP: 19850127 201001 2 009	Pengatur (II/c)	Pelaksana	
15	Akhmad Fauji NIP: 19800212 200501 1 011	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
16	Ida Nurhamidah NIP: 19680708 200701 2 008	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	Sturada
17	Deden Solihin NIP: 19820320 200901 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	
18	Hendri M Yusup NIP: 19820108 201001 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	
19	Romy Maryanto	-	Kontrak Kerja	
20	Heni Juwita	-	Kontrak Kerja	Sturada
21	Rusdi Juhana	-	Kontrak Kerja	Sturada
22	Ciming	-	Kontrak Kerja	Sturada

Sumber : Arsip Profil Lembaga Humas, 2010

1.5 *Job Description* Pemerintah Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Bupati Karawang telah menimbang, mengingat, serta memutuskan atau menetapkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pimpinan. Berikut ini adalah penjelasannnya :

1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan umum, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat. Fungsinya adalah:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pemerintahan umum.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hukum.
d. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang organisasi.
e. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat.

1. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan data dan sistem informasi, dokumentasi serta pengelolaan pemberitaan. Fungsinya adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi.
c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan dokumentasi.
d. Pengelolaan kegiatan pemberitaan.

Kepala Sub. Bagian Data dan Sistim Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam pengelolaan kegiatan bidang data dan informasi. Pelaksanaan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Data dan Sistim Informasi, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang data dan sistim informasi
b. Pengumpulan dan pengolahan data
c. Pengelolaan sistim informasi.

Kepala Sub. Bagian Dokumentasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dalam pengelolaan kegiatan bidang dokumentasi. Pelaksanaan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Dokumentasi, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dokumentasi
b. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi
c. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam urusan dokumentasi.

Kepala Sub. Bagian Pemberitaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dalam melakukan pemberitaan, baik melalui

media cetak maupun media elektronika guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan. Pelaksanaan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Pemberitaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemberitaan
b. Pelaksanaan pengelolaan pemberitaan melalui media cetak dan media elektronika
c. Pelaksanaan pengelolaan distribusi bahan-bahan penerbitan.

2. Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang tata pemerintahan umum, otonomi daerah dan keagrariaan. Fungsinya adalah :
   a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang tata pemerintahan umum.
   c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang pemerintahan otonomi daerah.
   d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengelolaan bidang keagrariaan.
3. Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang perundang-

undangan, bantuan hukum dan evaluasi dokumentasi hukum. Fungsinya adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, keputusan bupati dan produk hukum lainnya.
c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan perundang-undangan.
d. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaan bantuan hukum.
e. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumentasi hukum.

4. Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan. Fungsinya adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan pemerintah daerah.
c. Pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
d. Pelaksanaan kegiatan analisa formasi dan jabatan.

1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Pembangunan

Asisten Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan

kegiatan bidang perekonomian, pengendalian program dan kesejahteraan rakyat. Fungsinya adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perekonomian.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengendalian program.
d. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat.

1. Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi daerah dan ketahanan pangan. Fungsinya adalah :
   a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi daerah.
   c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan.
2. Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengelolaan kegiatan bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan. Fungsinya adalah :
   a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan daerah.
c. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
d. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi aspek bina keagamaan dan kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial. Fungsinya adalah :
   a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang bina keagamaan.
   c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan di bidang kebudayaan.
   d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan bina kesejahteraan sosial.

1.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang perlengkapan, umum dan tata usaha. Fungsinya adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perlengkapan.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang umum.

d. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang tata usaha.

1. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan perlengkapan meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan serta pendistribusian. Fungsinya adalah :
   a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   b. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.
   c. Pelaksanaan kegiatan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.
2. Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan administrasi umum yang meliputi rumah tangga dan protokol serta sanditel. Fungsinya adalah :
   a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   b. Pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan rumah tangga.
   c. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan.
   d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanditel.
3. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan dan pengendalian urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan. Fungsinya adalah:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan.
c. Pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan.
d. Pengendalian dan pengelolaan ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan.
e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut akan dijadikan landasan dalam penyusunan dan penetapan tujuan dari masing-masing unit kerja, dimana ukuran pencapaiannya akan terukur dari implementasi rencana kerja dengan pola-pola evaluasi yang obyektif berupa pengukuran indikator-indikator program yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

1.6 Sarana dan Prasarana Humas Setda Kabupaten Karawang

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga Humas dalam menunjang pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Humas Setda Kabupaten Karawang

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Komputer	12 Unit
2.	Printer	6 Unit
3.	Mesin Tik	4 Unit
4.	Kamera FM (Nikon)	2 Unit
5.	Kamera VHS	1 Unit
6.	Kamera Digital	1 Unit
7.	Handy Cam	1 Unit
8.	Handy Cam Digital	1 Unit
9.	DV Cam	1 Unit
10.	Kodak 160 (Nikon)	3 Unit
11.	Trifoot	1 Unit
12.	Blitz	2 Unit
13.	Blitz Digital	1 Unit
14.	Lampu Kamera	1 Unit
15.	Jaringan Internet	35 Akses (tersebar dilingkup Setda)
16.	AC	8 Unit
17.	Televisi	2 Unit
18.	Lemari Arsip	4 Unit
19.	White Board	2 buah
20.	Kursi	12 buah / 3 Set
21.	Kursi Biro	1 Buah
22.	Kursi Tamu	1 Set
23.	Meja	13 Buah
24.	Meja Komputer	7 Buah
25.	Meja Biro	1 Buah
26.	Filling Kabinet	15 Buah
27.	Rewinder	1 Buah
28.	Tip Besar	1 Unit
29.	Lemari pakaian	1 Buah
30.	Kaca (Cermin)	1 Buah
31.	Mobil	4 Unit
32.	Motor	5 Unit

Sumber : Arsip Profil Lembaga Humas dan Kartu Inventaris Ruangan, 2010

Berikut ini adalah penjelasam tentang sarana dan prasarana yang ada di kantor Humas Setda Kabupaten Karawang, terdiri dari tiga ruangan yaitu :

1. **Ruangan Kepala Bagian Humas,** ruangan ini digunakan untuk melakukan aktivitas Kepala bagian HUmas, dalam ruangan ini terdapat 1 unit komputer, 1 unit televisi, 2 unit AC, meja, kursi, lemari arsip dan 1 set meja tamu. Sarana dan prasarana tersebut disediakan untuk menunjang pekerjaan seorang Kepala Bagian agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya.
2. **Ruangan Staf-staf divisi Humas Setda Kabupaten Karawang,** ruangan ini digunakan untuk melakuan aktivitas staf-staf divisi Humas, dalam ruangan ini terdapat 11 unit dan 2 unit mesin tik komputer yang disediakan untuk staf-staf divisi Humas sebagai alat penunjang untuk melakukan pekerjaan. Selain itu sarana dan prasarana lain yang disediakan yaitu 6 AC, 1 unit televisi, 6 unit AC, meja, kursi, lemari arsip, 1 set meja tamu dan peralatan-peralatan lainnya.
3. **Ruang Peralatan divisi Humas (Gudang),** ruangan ini dikhususkan untuk menyimpan peralatan divisi Humas seperti: Kamera FM (Nikon), Kamera VHS, Kamera Digital, Handy Cam, Handy Cam Digital, DV Cam, Kodak 160 (Nikon), Trifoot, Blitz, Blitz Digital, Lampu Kamera, lemeri arsip, meja dan peralatan lainnya, dimana sarana dan prasaran tersebut disediakan untuk menujang pekerjaan divisi Humas.

Adapun kendaraan yang disediakan sebagai alat penunjang untuk melakukan kerja Humas divisi Humas Setda Kabupaten Karawang yang dilakukan di luar kantor, terdiri dari: 4 unit mobil, dan 5 unit motor.

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Praktek kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal. A. Yani No. 1 Karawang. Telp: (0267) 429800, 429801, 429802, 429803. Fax: (0267) 411923. Website: www.karawangkab.go.id.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dimulai pada tanggal 05 Juli sampai dengan 05 Agustus 2010 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 08.00 s/d 15.00 W.I.B.